

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH  
DI PROVINSI JAWA TIMUR DAN  
D.I.YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**NARINA KRINANTIYA**

**NIM.C2B008055**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Narina Krinantiya  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008055  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Ketimpangan Antar Wilayah di  
Provinsi Jawa Timur dan  
D.I.Yogyakarta**  
Dosen Pembimbing : Drs.R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 20 Maret 2014

Dosen Pembimbing

Drs.R. Mulyo Hendarto, MSP

NIP. 196104161987101001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Narina Krinantiya  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008055  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi  
Jawa Timur Dan D.I.Yogyakarta**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 April 2014**

Tim Penguji

1. Drs.R. Mulyo Hendarto, MSP. (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc. (.....)
3. Drs. Bagio Mudakir, MT. (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.com., Ph.D., Akt.  
Nip. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Narina Krinantiya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil tulisan saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang saya diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

(Narina Krinantiya)

---

NIM : C2B008055

## **ABSTRACT**

*Inequality is a problem with establishment process that may not be eliminated, especially in developing countries. East Java Province has higher inequality than Central Java, West Java, and DIYogyakarta. DIYogyakarta province has the lowest inequality than the other provinces. This study aimed to compare between East Java and DIYogyakarta as well as to analyze the influence of the variable investment, agglomeration, and the unemployment regional inequality rate both of two provinces.*

*This study uses secondary data. Descriptive analysis and Pearson Correlation is used as a method in this research. Inequality income level in the province of East Java and DIYogyakarta measured with Williamson index.*

*East Java Province has index number Williamson higher than DIYogyakarta province. It is indicating that East Java has the highest regional inequality. In East Java Province, variable investment and agglomeration have a weak relationship, where as step of unemployment have a strong relationship. In DI Yogyakarta, variable investment ,agglomeration and unemployment have a weak relationship with regional inequality*

*Keywords: Regional inequality, Williamson Index, Pearson Correlation, Investment, Agglomeration, and Unemployment.*

## ABSTRAK

Ketimpangan merupakan permasalahan dalam proses pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara yang sedang berkembang. Provinsi Jawa Timur memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan D.I.Yogyakarta. Provinsi D.I.Yogyakarta memiliki ketimpangan terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta, serta menganalisis pengaruh variabel investasi, aglomerasi, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan antar wilayah di kedua provinsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis deskriptif dan Korelasi Pearson yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta diukur dengan indeks Williamson.

Provinsi Jawa Timur memiliki angka indeks Williamson lebih tinggi dibandingkan Provinsi D.I.Yogyakarta. Hal ini menunjukkan lebih besar ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, variabel investasi dan aglomerasi memiliki hubungan yang lemah, sedangkan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang kuat terhadap ketimpangan. Di Provinsi D.I.Yogyakarta, variabel investasi, aglomerasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan lemah terhadap ketimpangan antar wilayah.

**Kata kunci : Ketimpangan antar wilayah, Indeks Williamson, Korelasi Pearson, Investasi, Aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR DAN D.I.YOGYAKARTA “, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu rasa terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Ph.D,Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Drs. R. Mulyo Hendarto. MSP, selaku dosen pembimbing yang atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Nenek Woyanti SE, M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepenuhnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan motivasi serta telah membantu penulis selama perkuliahan.

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua tersayang, Ayah Teguh Prayitno dan Ibu Siti Mahmudah, terimakasih atas semua kasih sayang, doa yang tiada henti, perlindungan, cinta serta dukungan yang selalu diberikan dengan tulus kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan ini. Penulis akan selalu ingat setiap pesan yang ayah dan ibu sampaikan karena semua itu akan membawa kesuksesan dan kebaikan dalam kehidupan penulis.
7. Adikku tersayang, Yosinta Kingkin Nur Robbani yang selalu mendoakan dan memberi dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat hidup penulis, Eko Wicaksono Pambudi terimakasih karena selalu mendukung, membantu, menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluargaku di Semarang, bapak Djoko, ibu Rahayu dan adikku Ayu yang selalu memberikan kasih sayangnya saat penulis jauh dari keluarga.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis : Batari “iik” , Hanis “nis”, dan Astri “mba as”, Fery “Kelik”, Dika ”Gusur”, Nailul “Boby”, Syamsudin “Syam”,. Semoga persahabatan ini dapat terjalin selamanya.
11. Ayula sahabatku, terimakasih atas waktu dan dukungannya yang selalu ada untuk penulis.
12. Teman sekamarku, mbak Dewi terimakasih atas pengertiannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh teman-teman IESP 2008 yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terimakasih persahabatannya selama ini. Semoga kesuksesan milik kita bersama IESP 2008.
14. Kepada seluruh sahabat KKN Jetak, terimakasih untuk kenangannya, “ceppy”, “nit2”, “dew2”, “tebby”.

Semarang, 20 Maret 2014  
Penulis,

Narina Krinantiya  
C2B008055

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	14
2.1.1 Pembangunan Ekonomi.....	14
2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	15
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.3.1 Model Pertumbuhan Neo-Klasik.....	18
2.1.3.2 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik.....	20
2.1.3.3 Hipotesis Kuznets.....	21
2.1.4 Ketimpangan Antar Wilayah.....	22
2.1.4.1 Indeks Williamson.....	23
2.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah.....	24
2.1.6 Investasi.....	25
2.1.7 Hubungan Antara Investasi Dengan Ketimpangan Antar Wilayah.....	27
2.1.8 Aglomerasi.....	27
2.1.9 Hubungan Antara Aglomerasi dengan Ketimpangan Antar Wilayah.....	28
2.1.10 Tingkat Pengangguran.....	29
2.1.11 Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan Antar Wilayah.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39

3.1.1 Variabel Penelitian.....	39
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Metode Analisis.....	44
3.4.1 Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson).....	44
3.4.2 Analisis Deskriptif.....	44
3.4.2 Korelasi Pearson.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi Jawa Timur.....	47
4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta	48
4.1.3 Kondisi Penduduk Provinsi Jawa Timur.....	50
4.1.4 Kondisi Penduduk Provinsi D.I.Yogyakarta.....	51
4.1.5 Kondisi Ekonomi.....	53
4.1.5.1 Investasi.....	53
4.1.5.2 Aglomerasi.....	56
4.1.5.3 Tingkat Pengangguran.....	58
4.2 Analisis Data.....	59
4.2.1 Korelasi Pearson.....	60
4.2.1.1 Pengaruh Investasi dengan Indeks Williamson di	
Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.....	60
4.2.1.2 Pengaruh Aglomerasi dengan Indeks Williamson di	
Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.....	62
4.2.1.3 Pengaruh Tingkat pengangguran dengan Indeks	
Williamson di Provinsi Jawa Timur dan	
D.I.Yogyakarta.....	64
4.3 Interpretasi Hasil.....	66
4.3.1 Pengaruh Investasi, Aglomerasi, dan Tingkat	
Pengangguran terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di	
Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Keterbatasan.....	71
5.3 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2010.....	2
Tabel 1.2	PDRB Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 (Milliar Rupiah).....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011.....	50
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.....	51
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	52
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2011.....	52
Tabel 4.5	Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011 (juta rupiah).....	53
Tabel 4.6	Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011 (juta rupiah).....	55
Tabel 4.7	Aglomerasi Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	57
Tabel 4.8	Pengangguran Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011(dalam %)......	59
Tabel 4.9	Koefisien Korelasi Antara Investasi dengan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur.....	60
Tabel 4.10	Koefisien Korelasi Antara Investasi dengan Indeks Williamson Provinsi D.I.Yogyakarta.....	61
Tabel 4.11	Koefisien Korelasi Antara Aglomerasi dengan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur.....	62
Tabel 4.12	Koefisien Korelasi Antara Aglomerasi dengan Indeks Williamson Provinsi D.I.Yogyakarta.....	63
Tabel 4.13	Koefisien Korelasi Antara Pengangguran dengan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur.....	65
Tabel 4.14	Koefisien Korelasi Antara Pengangguran dengan Indeks Williamson Provinsi D.I.Yogyakarta.....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kurva Hubungan Antara Indeks Williamson dengan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	7
Gambar 2.1 Kurva Kuznet.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 4.1 Peta Administratif Provinsi Jawa Timur.....	48
Gambar 4.2 Peta Administratif Provinsi D.I.Yogyakarta.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Input.....	75
Lampiran B Hasil Analisis.....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomis dan sosial (Todaro, 2004). Menurut Sadono (1985), pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2008).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Lili, 2008).

Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya

sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*) muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Adanya desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah semakin melebar. Berikut ini indeks ketimpangan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2006 hingga 2010.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2006-2010**

Provinsi	Indeks Williamson				
	2006	2007	2008	2009	2010
Jawa Timur	0,9764	0,9759	0,9757	0,9758	1,1059
Jawa Tengah	0,7102	0,7096	0,7092	0,7035	0,6972
Jawa Barat	-	-	-	-	0,5578
D.I.Yogyakarta	0,4375	0,4409	0,4434	0,4395	0,4594
Banten	-	0,8325	0,8006	0,7598	0,7663
DKI.Jakarta	0,5046	-	0,5438	0,5257	0,5299

Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2006-2010, di olah.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa indeks ketimpangan yang terdapat pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur mempunyai angka indeks Williamson paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka indeks pada tahun 2006 sebesar 0,9764, tahun 2007 sebesar 0,9759, tahun 2008 sebesar 0,9757, tahun 2009

sebesar 0,9758 dan tahun 2010 sebesar 1,1059. Keadaan tersebut terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur selain memiliki angka indeks ketimpangan paling tinggi dibandingkan provinsi lain dan juga angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi Jawa Tengah memiliki angka indeks ketimpangan yang terus menurun dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2006 sebesar 0,7102 menjadi sebesar 0,6972 pada tahun 2010. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat memiliki angka indeks ketimpangan sebesar 0,5578 pada tahun 2010, pada tahun lainnya tidak dapat diketahui angka indeks Williamson karena data jumlah penduduk hanya disediakan setiap sensus penduduk dilaksanakan dan tidak disajikan setiap tahunnya sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan indeks Williamson.

Provinsi D.I.Yogyakarta mempunyai angka indeks ketimpangan paling kecil dibandingkan provinsi lainnya yaitu ditunjukkan pada tahun 2006 sebesar 0,4375, tahun 2007 sebesar 0,4409, tahun 2008 sebesar 0,4434, tahun 2009 sebesar 0,4395, dan tahun 2010 sebesar 0,4594. Meskipun Provinsi D.I.Yogyakarta mempunyai angka indeks paling rendah dibandingkan tiga provinsi lainnya, tetapi angka tersebut juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi Banten memiliki angka indeks Williamson pada tahun 2007 sebesar 0,8325 dan tahun 2010 menjadi sebesar 0,7663. Provinsi DKI Jakarta memiliki angka indeks Williamson sebesar 0,5046 pada tahun 2006 kemudian menjadi 0,5299 pada tahun 2010.

Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, kemudian Provinsi D.I.Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota yang

masing-masing provinsi tersebut memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap kabupaten/kota.

Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan antar wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Namun kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh semua provinsi di seluruh Indonesia secara merata. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan antar daerah. Berikut dibawah ini yaitu PDRB menurut lapangan usaha untuk masing-masing Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kedua provinsi tersebut memiliki kesamaan sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada masing-masing provinsi yaitu sektor perdagangan, hotel & restoran, dimana sebanyak 31,8% untuk Provinsi Jawa Timur dan 20,8% untuk Provinsi D.I.Yogyakarta. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur yaitu 25,1%, dan kontribusi terbesar kedua untuk Provinsi D.I.Yogyakarta yaitu sektor pertanian sebesar 16,1%. Adapun sektor yang memberikan sumbangan terkecil pada masing-masing provinsi yaitu sektor

listrik, gas & air bersih untuk Provinsi Jawa Timur hanya sebesar 1,3% dan sektor pertambangan & galian yaitu sebesar 0,7%.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 (Milliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	Jawa Timur		D.I.Yogyakarta	
	Rupiah	%	Rupiah	%
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	52,628	14.3	3,556	16.1
2. Pertambangan & Penggalian	8,229	2.2	157	0.7
3. Industri Pengolahan	92,171	25.1	2,983	13.5
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,932	1.3	201	0.9
5. Konstruksi	11,995	3.3	2,188	9.9
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	116,645	31.8	4,611	20.8
7. Pengangkutan & Komunikasi	27,946	7.6	2,431	11.0
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	20,186	5.5	2,185	9.9
9. Jasa-Jasa	32,252	8.8	3,818	17.3
Total	366,984	100.0	22,130	100.0

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2011, diolah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Di mana ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang tinggi maka wilayah tersebut dikatakan makmur/sejahtera. Menurut Simon Kuznets mengemukakan ada enam ciri proses pertumbuhan yang dapat ditemui hampir semua negara yang sedang maju (Todaro, 2004) yaitu:

- 1) Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- 2) Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi.
- 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- 4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

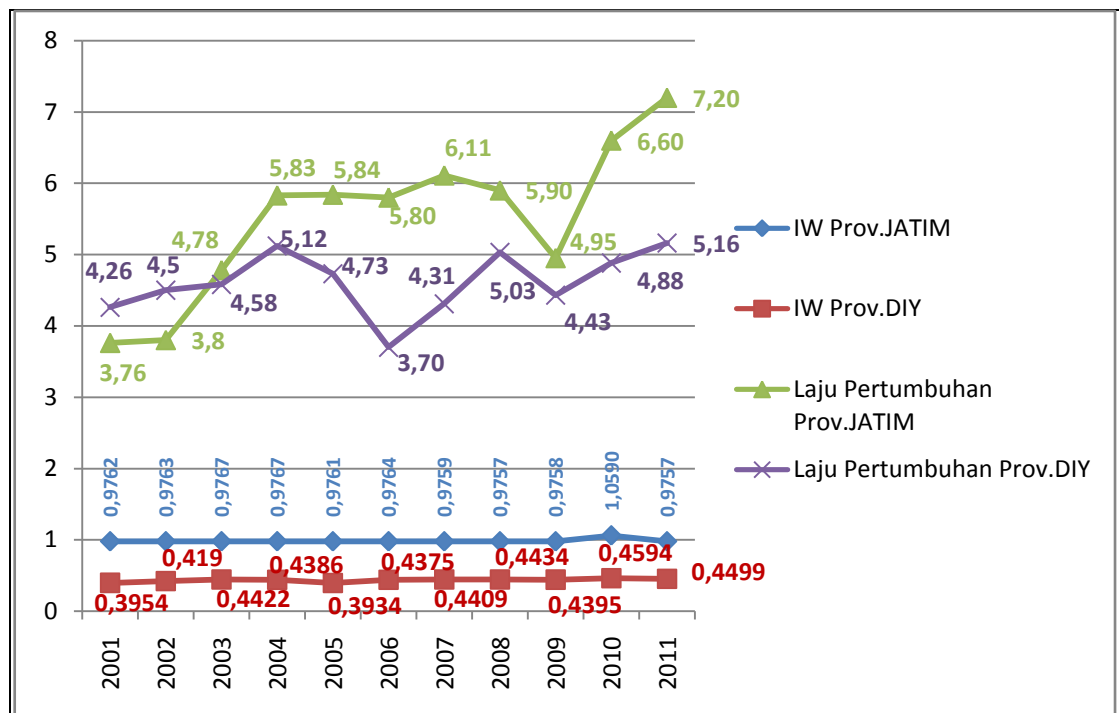
- 5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lain sebagai pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- 6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Selama awal proses pembangunan terjadi dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan. Pertukaran atau *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan selalu terjadi dan dihadapi oleh negara-negara miskin atau yang sedang berkembang. Menurut Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap awal-awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan memburuk sehingga ketimpangan tinggi. Namun pada tahap-tahap selanjutnya akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan rangkaian dari perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan PDB perkapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk seperti huruf U terbalik.

Hipotesis Kuznet ini tidak terjadi di Provinsi Jawa Timur ataupun D.I.Yogyakarta karena angka ketimpangan pada kedua provinsi tersebut menunjukkan cenderung tetap dan tidak banyak menunjukkan perubahan pada tahun ke tahun padahal pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tampak fluktuatif. Berikut ini yaitu kurva hubungan antara indeks ketimpangan antar kabupaten/kota

dengan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I.Yogyakarta yang terjadi selama tahun 2001 hingga 2011.

**Gambar 1.1**  
**Kurva Hubungan Antara Indeks Williamson**  
**dengan Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011**



Sumber : Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta Dalam Angka, Tahun 2001-2011,diolah.

Pada Gambar 1.1 menunjukkan Angka indeks ketimpangan Provinsi Jawa Timur yang cenderung tidak banyak berubah dan angka pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun 2001-2011. Tahun 2001 angka indeks ketimpangan sebesar 0,9762 dengan besar angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,76%, tahun 2002 angka indeks ketimpangan menurun menjadi sebesar 0,9763 dengan besar angka pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi sebesar 3,80%. Pada tahun 2003-2008 angka indeks ketimpangan terus berfluktuasi yaitu berurutan dari tahun 2003-

2009 sebagai berikut: 0,9767, 0,9767, 0,9761, 0,9764, 0,9759, 0,9757, 0,9758 tetapi besar angka pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya yaitu dari tahun 2003-2008 sebagai berikut: 3,76%, 3,80%, 4,78%, 5,83%, 5,84%, 5,80%, 6,11%, tetapi menurun pada tahun 2008-2009 yaitu 5,90%, 4,95%. Pada tahun 2010 angka indeks ketimpangan meningkat menjadi sebesar 1,1059 dan besar angka pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 6,6%. Tahun 2011 angka indeks ketimpangan kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,9757 dan diikuti kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yaitu 7,20%.

Provinsi D.I.Yogyakarta memiliki angka indeks ketimpangan yang cenderung berfluktuasi dari tahun 2001-2011, tahun 2001-2003 angka indeks ketimpangan selalu meningkat yaitu 0,3954, 0,4190, 0,4422, keadaan demikian diikuti dengan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat juga yaitu sebesar 4,26%, 4,50%, 4,58%, pada tahun 2004 dan 2005 angka indeks ketimpangan menurun menjadi sebesar 0,4386 dan 0,3934 diikuti dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi tahun 2004 menjadi 5,12%, tetapi tahun 2005 menurun menjadi 4,73%. Angka indeks ketimpangan tahun 2006-2008 terus meningkat kembali yaitu masing-masing sebesar 0,4375, 0,4409, 0,4434 dan pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2006 yaitu 3,70%, lalu kemudian meningkat pada tahun 2007 dan 2008 yaitu 4,31% dan 5,03%. Tahun 2009 angka indeks ketimpangan menurun kembali menjadi 0,4395 diikuti menurunnya angka pertumbuhan menjadi sebesar 4,43%. Namun pada tahun 2010 indeks ketimpangan meningkat kembali menjadi sebesar

0,4594 dan pertumbuhan ekonomipun meningkat menjadi sebesar 4,88%, dan tahun 2011 indeks ketimpangan menurun menjadi 0,4499 dengan diikuti meningkatnya angka pertumbuhan menjadi 5,16%.

Menurut Jhingan (1993) dalam teori Myrdal, ketimpangan berkaitan erat dengan adanya sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba ini yang menjadikan berkembangnya pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan laba tinggi, sementara itu wilayah-wilayah yang lain akan tetap terlantar. Ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi daripada dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya adalah investasi.

Investasi adalah perpindahan modal dimana akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Di wilayah yang maju, permintaan yang meningkat akan merangsang pertumbuhan investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Investasi hanya akan terjadi pada lingkup tertentu sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1993). Kelangkaan modal ini yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Selain investasi, salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu pola pemusatan (aglomerasi) dimana terdapat berbagai jenis industri di suatu tempat tertentu. Untuk menganalisis pertumbuhan suatu wilayah maka

harus dipahami mengenai kekuatan aglomerasi, manfaat yang ditimbulkan dari aglomerasi tersebut, salah satunya adalah penghematan skala (*scale economies*), yaitu terdapat penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. Biaya tetap yang besar merupakan akibat dari investasi dalam bentuk pabrik dan peralatan yang memungkinkan akan dapat dilakukan pemanfaatan pabrik dan peralatan dalam skala besar sehingga dapat membagi beban biaya tetap pada berbagai unit yang terdapat dalam sistem produksi (Bertha P.Siahaan, 2010).

Industri akan cenderung terpusat pada daerah yang memiliki potensi besar dengan akses yang cepat untuk memperoleh bahan baku. Kota pada umumnya menawarkan kelebihan dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, menarik untuk melakukan investasi baru dan teknologi, melihat dari hal tersebut maka banyak industri yang tumbuh dalam perkotaan. Persebaran industri yang tidak merata maka dapat menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah, karena hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu.

Selain investasi dan aglomerasi, ada lagi beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Menurut Lessmann (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Dalam penelitian Lessmann (2006) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah menjelaskan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan ketimpangan wilayah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I.Yogyakarta merupakan dua provinsi di Pulau Jawa yang mengalami masalah ketimpangan antar wilayah dalam proses pembangunan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kedua provinsi tersebut tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Melihat angka indeks Williamson Provinsi Jawa Timur masih sangat tinggi dan cenderung tetap, kemudian untuk Provinsi D.I.Yogyakarta dengan angka indeks Williamson yang kecil tetapi angka tersebut cenderung selalu meningkat setiap tahunnya, maka tujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta itu sendiri yaitu untuk mencapai pemerataan yang masih belum berhasil karena pertumbuhan ekonomi belum bisa mengurangi ketimpangan antar wilayah pada kedua provinsi tersebut.

Berdasarkan data yang disajikan pada latar belakang, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I.Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis kondisi ketimpangan di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

- 1) Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

- 2) Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan antar wilayah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

## Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat mengenai keadaan obyek penelitian, kondisi penduduk, kondisi ekonomi dan dilanjutkan dengan analisis ketimpangan antar wilayah.

## Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Menurut Meier (1995) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi.

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto* atau GDP). Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Menurut Lincolin Arsyad (1997) menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai :

- 1) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
- 2) Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diikuti oleh perubahan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

### **1.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Lincoln Arsyad, 1997). Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.

Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai

pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

### **1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

#### **1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja**

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabene merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

#### **2. Akumulasi Modal**

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fisik dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

### 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan maka harus mempertimbangkan PDRB riil satu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya, diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \left| \frac{PDRB_{it} - PDRB_{to}}{PDRB_{to}} \times 100 \right|$$

Dimana:

$Y_{it}$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i, tahun t

$PDRB_{it}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i, tahun t

$PDRB_{to}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i, tahun t-1

Ada beberapa alat pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu ( Asman Al Faiz, 2011):

#### 1) Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB ataupun PDRB adalah ukuran yang bersifat global dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai karena belum dapat mensejahterakan penduduk yang sesungguhnya,

padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap negara atau daerah yang bersangkutan.

## 2) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik regional per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

### 2.1.3.1 Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

Menurut teori neoklasik membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
- b) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
- c) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, persamaan ini dinyatakan dengan :

$$Y = TK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \quad (2.1)$$

dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja dan T adalah teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen maka model neo klasik Solow juga disebut model pertumbuhan eksogen. Model Solow memiliki beberapa kekurangan dan untuk memperbaikinya dengan memecah total faktor produksi dengan memasukan variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi. Model ini disebut model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan endogen beranggapan bahwa perdagangan internasional penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model perdagangan internasional diukur melalui aktifitas ekspor dan impor, yaitu:

$$Y = F(A_i, K_i, L_i) \quad (2.2)$$

Dimana Y adalah output, A adalah indeks produktifitas, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja, i adalah tahun, sedangkan indeks produktifitas (A) adalah fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yaitu:

$$A_i = F(X_i, M_i) \quad (2.3)$$

Ada beberapa ahli ekonom seperti Mankiw, Romer dan Weil melakukan studi untuk penyempurnaan model pertumbuhan ekonomi neoklasik untuk memperjelas dan menambahkan dasar teoritis bagi sumber pertumbuhan ekonomi (Esa Suryaningrum, 2000). Model Solow hanya dapat menerangkan hubungan modal dan angkatan kerja yang bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan angkatan kerja yang bekerja, yaitu :

$$Y = TK_t^\alpha L_t^\beta H^{1-\alpha-\beta} \quad (2.4)$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, T adalah teknologi dan H adalah modal manusia.

### **2.1.3.2 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik**

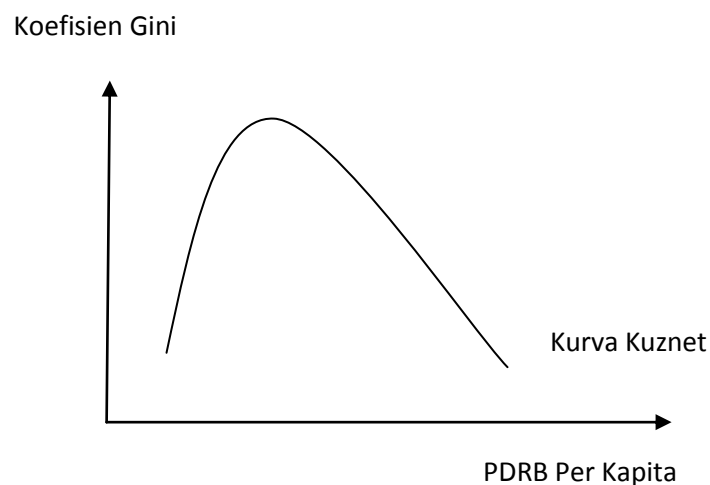
Dampak balik (*backwash effect*) yaitu sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan,1993).

Menurut Myrdal dalam M.L Jhingan (1993), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

### 2.1.3.3 Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan merata. Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

**Gambar 2.1**  
**Kurva Kuznet**



Sumber : Todaro (2006)

Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut seperti digambarkan dalam kurva Kuznet pada gambar 2.2, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada

korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan, namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif. Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui hampir diseluruh negara maju, yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
- b. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

#### **2.1.4 Ketimpangan antar wilayah**

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan

masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Syafrizal, 2008).

Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2004).

#### 2.1.4.1 Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

$Y_i$  = PDRB per kapita daerah i

$Y$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah i

$N$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

### **2.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah**

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,
- 2) Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,
- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
- 4) Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,
- 5) Rendahnya mobilitas sosial,
- 6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,
- 7) Kondisi memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat

ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang,

- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

### **2.1.6 Investasi**

Investasi adalah perpindahan modal dimana akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Di wilayah yang maju, permintaan yang meningkat akan merangsang pertumbuhan investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Investasi hanya akan terjadi pada lingkup tertentu sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1993). Kelangkaan modal ini yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Menurut Sadono (1994), banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan masa depan untuk memperoleh keuntungan, maka beberapa faktor juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan investasi dalam perekonomian. Faktor-faktor utama dalam menentukan investasi yaitu:

- 1) Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
- 2) Suku bunga.
- 3) Ramalan keadaan ekonomi masa depan.
- 4) Kemajuan teknologi.

- 5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya.
- 6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi yang dilakukan oleh swasta dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Menurut Krugman (2005), yang dimaksud dengan FDI atau PMA yaitu arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumberdaya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Investasi asing (PMA) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha dalam negeri.

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.7 Hubungan Antara Investasi Dengan Ketimpangan antar wilayah**

Investasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Keadaan demikian dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi akan cenderung menambah ketidakmerataan. Pada wilayah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa maka akan mendorong naiknya investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut, kemudian keadaan sebaliknya yaitu pada wilayah yang kurang berkembang, investasi akan cenderung rendah karena pendapatan masyarakatnya juga rendah. Kekuatan pasar mempunyai peran terpenting dalam menarik investasi swasta kesuatu daerah dengan keuntungan yang dimiliki oleh daerah tersebut ( Sjafrizal, 2008).

### **2.1.8 Aglomerasi**

Menurut Mudrajad Kuncoro (2002), aglomerasi yaitu konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan yang diakibatkan adanya lokasi saling berdekatan (*economies of proximity*) yang

diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk menekan biaya-biaya, seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi. Kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonstruksi industri. Ada tiga manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan di atas, yaitu : penghematan skala (*scale economies*), penghematan lokasi (*localization economies*), dan penghematan urbanisasi (*urbanisation economies*).

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang tinggi akan dapat mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah karena proses pembangunan daerah yang cepat hanya akan terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Sedangkan konsentrasi ekonomi yang rendah akan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu ketidakmerataan akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembangunan antar wilayah.

#### **2.1.9 Hubungan Antara Aglomerasi dengan Ketimpangan antar wilayah**

Menurut Jamie Bonet (2006), aglomerasi yaitu pemusatan aktifitas produksi digunakan sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah. Aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terjadinya hambatan mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terjadi surplus tenaga kerja dalam perekonomian. Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa cara, pertama adalah dengan menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk provinsi tersebut dan yang kedua adalah dengan menggunakan konsep aglomerasi produksi (Jamie Bonet, 2006).

### 2.1.10 Tingkat Pengangguran

Dalam pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh yang diinginkannya. Menurut BPS, pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran dihitung dengan:

$$\text{Tingkat pengangguran tahun}_i = \frac{\sum \text{orang yang mencari pekerjaan}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Menurut Sadono (2002), pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, sebagai berikut:

- a. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

- c. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja. Efeknya bagi perekonomian yaitu akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat juga sebagai wujud dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.
- b. Pengangguran musiman, yaitu keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Pengangguran ini biasanya terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur, dan pada musim kemarau petani juga tidak dapat mengerjakan sawahnya. Pengangguran seperti ini yang disebut sebagai pengangguran musiman.
- c. Pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran

tersembunyi. Contohnya adalah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

- d. Setengah menganggur, yaitu pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari atau 1-2 hari seminggu). Pada negara-negara yang berkembang migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat, hingga sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu dan ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak juga bekerja penuh waktu. Pekerja yang seperti ini disebut *underemployed*, dan jenis penganggurannya disebut *underemployment*.

#### **2.1.11 Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan antar wilayah**

Kondisi demografis dalam suatu wilayah yaitu meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal

dengan wilayah lainnya. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula (Syafriзал, 2008).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Menurut Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) dalam penelitian yang berjudul *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 1993-2000*, dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah dan alat analisisnya Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, trend dan korelasi pearson. Hasil penelitiannya yaitu selama periode pengamatan terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial serta Hipotesis U-Terbalik Kuznet berlaku di Kabupaten Banyumas.

Menurut Dena Aksinia dalam penelitian yang berjudul *Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan tahun 2000-2006*, dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan konvergensi dilihat dari PDRB per kapita, data penduduk, dan dummy SDA migas dan alat analisisnya tipologi klassen, indeks williamson, indeks entropy Theil, trend dan korelasi pearson. Hasil penelitiannya yaitu Hipotesis U terbalik Kuznet berlaku di Kalimantan dan pendapatan per kapita tidak mengalami konvergensi.

Menurut Yuki Angelia dalam penelitian yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008, dengan menggunakan variabel PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi, Desentralisasi fiskal dan alat analisisnya Hipotesis Kuznet melalui korelasi Pearson, analisis regresi. Hasil penelitiannya yaitu Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Jaime Bonet dalam penelitiannya yang berjudul Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Pendapatan Regional, variabel yang digunakan yaitu penerimaan regional. Hasil penelitiannya yaitu dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yaitu alokasi dari porsi utama atas sumber daya lokal baru untuk pengeluaran sekarang (gaji dan upah), investasi infrastruktur dan modal, kurangnya komponen redistribusi dalam transfer nasional, serta kurangnya kapasitas institusional pada pemerintah daerah. Selain itu dua variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan aglomerasi produksi juga berhubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional.

Menurut Christian Lessmann dalam penelitiannya yang berjudul Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional, metode analisis yang digunakan yaitu Metode analisis cross section, Analisis data panel. Hasil penelitiannya yaitu dengan derajat yang semakin tinggi dari desentralisasi berhubungan kuat dengan

rendahnya ketimpangan regional. Di mana wilayah yang miskin tidak akan dirugikan dengan adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.

Menurut Budiantoro Hartono dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel : Investasi, angkatan kerja, alokasi dana bantuan. Hasil Penelitiannya yaitu Ketimpangan semakin melebar, peningkatan investasi akan menyebabkan ketimpangan menurun, peningkatan jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan kesempatan kerja maka akan mengurangi ketimpangan, alokasi dana bantuan tidak merata sehingga akan meningkatkan ketimpangan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian Model analisis	Hasil Penelitian
1	Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003)	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 1993-2000	Variabel :Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah  Metode Analisis : Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, trend dan korelasi pearson	Selama periode pengamatan terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial serta Hipotesis U-Terbalik Kuznet berlaku di Kabupaten Banyumas.
2	Dena Aksinia	Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan tahun 2000-2006	Variabel : pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan konvergensi dilihat dari PDRB per kapita, data penduduk, dan <i>dummy</i> SDA migas  Model analisis: tipologi kelas, indeks williamson, indeks entropy Theil, trend dan korelasi pearson	Hipotesis U terbalik Kuznet berlaku di Kalimantan dan pendapatan per kapita tidak mengalami konvergensi.
3	Yuki Angelia	Analisis Ketimpangan Pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008	Variabel : PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi, Desentralisasi fiskal  Model analisis:Hipotesis Kuznet melalui korelasi Pearson, analisis regresi	Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI Jakarta.
4	Jaime Bonet	Desentralisasi Fiskal dan	Variabel: penerimaan regional	Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan

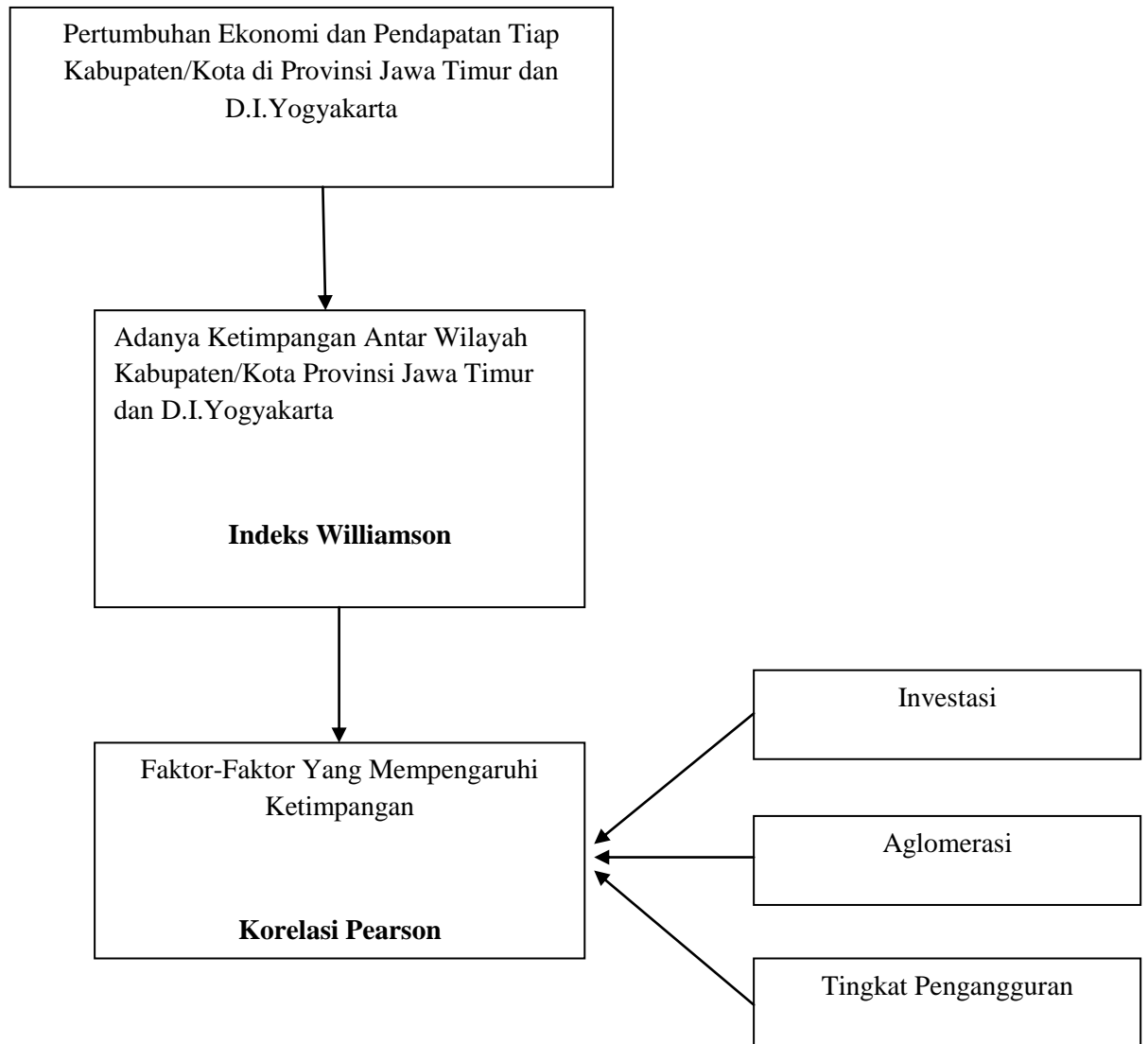
		Disparitas Pendapatan Regional		ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yaitu alokasi dari porsi utama atas sumber daya lokal baru untuk pengeluaran sekarang (gaji dan upah), investasi infrastruktur dan modal, kurangnya komponen redistribusi dalam transfer nasional, serta kurangnya kapasitas institusional pada pemerintah daerah. Selain itu dua variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan aglomerasi produksi juga berhubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional.
5	Christian Lessmann	Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional	Metode analisis cross section, Analisis data panel	Dengan derajat yang semakin tinggi dari desentralisasi berhubungan kuat dengan rendahnya ketimpangan regional. Di mana wilayah yang miskin tidak akan dirugikan dengan adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.
6	Budiantoro Hartono	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	Variabel : Investasi, angkatan kerja, alokasi dana bantuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketimpangan semakin melebar.</li> <li>2. Peningkatan investasi akan menyebabkan ketimpangan menurun.</li> <li>3. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan kesempatan kerja maka akan mengurangi ketimpangan.</li> <li>4. Alokasi dana bantuan tidak merata sehingga akan meningkatkan ketimpangan.</li> </ol>

### **2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Setiap daerah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar wilayah satu dengan yang lainnya. Perbedaan pertumbuhan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan potensi yang ada pada tiap daerah seperti sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan antar wilayah yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya disparitas pendapatan dan merupakan konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota menggunakan indeks Williamson. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Faktor-Faktor yang digunakan yaitu investasi, aglomerasi, tingkat pengangguran.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi, aglomerasi, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2001 – 2011.

##### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

Untuk memberikan pemahaman terhadap variabel dalam penelitian ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta, maka diperlukan definisi operasional yaitu:

###### **a. Ketimpangan Antar Wilayah**

Ketimpangan antar wilayah diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson, dimana pendapatan diukur dengan menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2000 untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Indeks ketimpangan pembangunan wilayah ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < I_w < 1$ .

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur menggunakan logaritma natural PDRB perkapita kabupaten/kota, dengan tujuan untuk memperoleh perubahan relatif (dibandingkan tahun sebelumnya) dari PDRB perkapita.

Rumus yang dipergunakan yaitu :

$$Y_{it} = \left| \frac{PDRB_{ti} - PDRB_{t0}}{PDRB_{t0}} \times 100 \right|$$

Dimana :

$Y_{it}$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i, tahun t

$PDRB_{ti}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i, tahun t

$PDRB_{t0}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i, tahun t-1

$PDRB_{t0}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i, tahun t-1

c. Investasi

Dalam penelitian ini investasi yang digunakan yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Data investasi yang digunakan adalah PMA dan PMDN Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta yang telah direalisasi menurut lokasi. Satuan yang digunakan yaitu dengan satuan rupiah.

d. Aglomerasi

Aglomerasi adalah konsentrasi kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Aglomerasi diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yaitu menggunakan ukuran aglomerasi industri dengan menghitung *share* PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia. Satuan yang digunakan yaitu rupiah.

$$\text{Aglomerasi} = \frac{\text{PDRB Kabupaten /Kota}}{\text{Total PDRB}}$$

e. Tingkat Pengangguran

Menurut BPS (2011), pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nilai tingkat pengangguran merupakan persentase dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat dirumuskan :

$$\text{Tingkat pengangguran tahun}_i = \frac{\sum \text{orang yang mencari pekerjaan}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2004), data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terbitan.
2. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta dalam beberapa tahun terbitan.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antar lain :

- PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011.
- PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011.
- PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011.
- PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2001-2011.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 2000 Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2011.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 2000 Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2001-2011.

- PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2011.
- PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2001-2011.
- Jumlah penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2001-2011.
- Jumlah penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta tahun 2001-2011.
- Data jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2001-2011.
- Data jumlah penduduk D.I.Yogyakarta tahun 2001-2011.
- Data jumlah pengangguran dan angkatan kerja Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta tahun 2001-2011.
- Data investasi yaitu PMA dan PMDN yang telah direalisasikan Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta tahun 2001-2011.
- Data geografis dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari lembaga – lembaga terkait. Pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal – jurnal yang berhubungan dengan masalah ketimpangan antar wilayah.

### 3.4 Metode Analisis

#### 3.4.1 Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

$Y_i$  = PDRB per kapita daerah i

$Y$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah i

$N$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

#### 1.4.2 Analisis Deskriptif

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003), Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu keadaan dan mencoba untuk mencari suatu uraian yang menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Dalam analisis deskriptif dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam

penelitian tersebut. Disamping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan.

### 3.4.3 Korelasi Pearson

Korelasi Pearson biasanya disebut dengan korelasi produk momen atau korelasi saja. Nilai dari korelasi ini adalah  $r$  yang besarnya antara -1 hingga 1. Jika  $r < 0$  maka artinya berkorelasi negatif, artinya jika nilai salah satu peubah semakin besar maka peubah yang lain akan semakin kecil. Sebaliknya jika  $r > 0$  maka artinya terjadi hubungan linear yang positif. Jika  $r = 0$  artinya berkorelasi tetapi bukan berarti tidak berhubungan, mungkin berhubungan namun tidak linear. Semakin mendekati nilai  $r$  dengan 1 atau -1 maka semakin erat hubungan linear antar peubah tersebut. Adapun rumus Korelasi Pearson yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi yang dicari

$\sum xy$  = Jumlah perkalian variabel  $x$  dan  $y$

$\sum x$  = Jumlah nilai variabel  $x$

$\sum y$  = Jumlah nilai variabel  $y$

$\sum x^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel  $x$

$\Sigma y^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = Banyak sampel